

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Literatur

- Al Rasyid, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.
- Atmaja, Arifin P. Soeria, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo, 2011.
- C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, Sidgwick and Jackson, London, 1963.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Djarmika, Sastra & Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1965.
- Fachruddin, Irfan, *Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, dalam *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia, Nomor 111, Desember 1994, Jakarta, 1994.
- Ghifron, Ahmad dan Sudarsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, PT. Melton Putra, Jakarta, 1991.
- Handayaniingrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, Gunung Agung, Jakarta, 1980.
- Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hawawi, Hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994.
- Hawke, Neil., dan Parpworth, Neil, *Pengantar Hukum Administrasi*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2017.

- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- Huisman, R.J.H.M, *Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding*, Kobra, Amsterdam, 1983.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Johan, Teuku Saiful Bahri, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- KA, Pudja Pramana, *Ilmu Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Kusdarini, Eny, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011.
- Kuswardi, Moh dan Ibrahim Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN FH UI, 1978.
- Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, 1975, Iktisar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Lotulung, Paulus E, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Lubis, Solly, *Asas-Asas Nasional Di Bidang Hukum Tata Negara*”, dalam *Majalah Hukum Nasional*, No.2, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1989.

- M. Hadjon, Philipus, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- M. Hadjon, Philipus, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam buku, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, B. Arief Sidarta, et., al (Eeditor), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1966.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Ekonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001.
- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah* Pusat Studi Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 2004.
- MD, Moh. Mahfud, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Nitibagaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta, 2002.
- Nugraha, Safitri et. Al, *Hukum Administrasi Negara*, Center for Law and Good Governance (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.
- Poerwasunata, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Rosdakarya, Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2007.
- S.F. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Sibuea, Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan : Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Sudrajat, Tedi, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan & Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Triatmojo, Sudibyo, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjajaran, Bandung, 1960.
- Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988.
- Utrecht, E, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, NV Bali Buku Indonesia, Jakarta, 1957.
- Van Wijk, H.D/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Vuga, s'Gravenhage, 1995.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976.
- Wade, H.W.R, *Administrative Law, Third Edition*, Claredon Press, Oxford, 1971.
- Winarnno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202)

3. Jurnal

Syafrudin, Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Mokhsen, Nuraida dkk, *Pengawasan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Komisi Aparatur Sipil Negara, Edisi Kedua, 2019.

Mustamu, Julista, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*, SASI Vol. 20 No. 2, 2014.

4. Internet

BKD Nusa Tenggara Barat, 2018, Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), <https://bkd.ntbprov.go.id/informasi-umum/berita/jabatan-aparatur-sipil-negara-asn>, diakses pada 22 November 2021.

Komisi Aparatur Sipil Negara, 2019, 7 Alasan PPK belum melakukan PTDH Terhadap ASN Berstatus Terpidana Korupsi, <https://www.kasn.go.id/details/item/368-7-alasan-ppk-belummelakukan-ptdh-terhadap-asn-berstatus-terpidana-korupsi>, diakses pada 28 Desember 2021.

Kompas.com, 2021, PP Disiplin PNS, Pejabat dan Atasan Yang Tak Sanksi, PNS Melanggar Akan Dihukum, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/16/12220611/pp-disiplin-pns-pejabat-dan-atasan-yang-tak-sanksi-pns-melanggar-akan?page=all>, diakses pada 22 Oktober 2021.

PTUN Denpasar, 2019, Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Dalam Persepektif Hukum Administrasi Negara, <https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/8>, diakses pada 22 November 2021.

Republika, 2019, Berapa kerugian negara jika PNS korup belum dipecat, <https://www.republika.co.id/berita/pn85q2430/berapa-kerugian-negara-jika-pns-korup-belum-dipecat>, diakses pada 8 Januari 2022.

Sekretariat Kabinet, 2019, Penuntasan Capai 88%, 1.906 PNS Terlibat Tipikor Diberhentikan Tidak Hormat, <https://setkab.go.id/penuntasan-capai-88-1-906-pns-terlibat-tipikor-diberhentikan-tidak-hormat/>, diakses pada 12 Februari 2022.

Tirto.id, 2018, BKN: PNS Koruptor Paling Banyak Berasal dari Pemprov DKI Jakarta, <https://tirto.id/cYKuhttps://tirto.id/bkn-pns-koruptor-paling-banyak-berasal-dari-pemprov-dki-jakarta-cYKu>, diakses pada 25 Oktober 2021.

Universitas Wamadewa, 2016, Seputar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PNS, <http://warmadewa.ac.id/index.php?/berita/detail/202/Seputar-Jabatan-Struktural-dan-Jabatan-Fungsional-PNS.html>, diakses pada 22 November 2021.

5. Lain-lain

Andi Afri, Pelaksanaan Disiplin PNS Di Lingkungan Kantor Dikpora Kec. Sigi Biromaru Sesuai PP No. 53 Tahun 2010 dan UU No. 5 Tahun 2014, *Laporan penelitian/skripsi/ tesis/ disertasi*, Fakultas Hukum UNTAD, Palu, 2014.

